

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara berkembang, Indonesia tengah berupaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi negara dengan perekonomian yang kuat. Namun, dalam praktiknya, pembangunan ekonomi nasional masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, kesenjangan antarwilayah, serta ketimpangan distribusi pendapatan.

Salah satu indikator utama dalam menilai kinerja ekonomi suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar -2,07% akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh sektor perekonomian. Meskipun demikian, perekonomian nasional berhasil pulih dengan mencatat pertumbuhan sebesar 5,3% pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2024)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan tren positif dengan capaian sebesar 5,05 persen secara tahunan (y-on-y). Namun, capaian ini tidak tersebar merata di seluruh provinsi. Di tingkat regional, Pulau Jawa masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB nasional, dengan lima provinsinya yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan

Jawa Timur menyumbang lebih dari separuh total PDB nasional. DKI Jakarta tetap dominan sebagai pusat ekonomi dan bisnis, sementara Jawa Timur dan Jawa Tengah memperlihatkan stabilitas sektor industri dan pertanian. Di sisi lain, DI Yogyakarta mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah di antara semua provinsi, yakni sebesar 4,18 persen, yang disebabkan oleh kontribusi sektor primer yang relatif kecil dan ketergantungan pada sektor pendidikan dan pariwisata (Badan Pusat Statistik, 2024).

Provinsi-provinsi di luar Jawa mengalami pertumbuhan yang sangat beragam. Papua Barat menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada tahun 2023, mencapai 15,22 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan aktivitas di sektor pertambangan dan penggalian, khususnya eksplorasi migas. Diikuti oleh Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang masing-masing tumbuh di atas 10 persen, didorong oleh hilirisasi nikel dan pembangunan kawasan industri. Namun, tidak semua provinsi di luar Jawa mengalami pertumbuhan tinggi. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Tengah mengalami perlambatan yang signifikan akibat gangguan cuaca, penurunan produksi pertanian, dan transisi pembangunan infrastruktur yang belum optimal (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Di Sumatra, pertumbuhan ekonomi cenderung moderat. Provinsi Riau dan Bangka Belitung mengalami kontraksi ekonomi, terutama karena turunnya harga komoditas unggulan seperti sawit dan karet. Sebaliknya, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan positif yang stabil karena penguatan sektor industri pengolahan dan pertambangan. Aceh mengalami pertumbuhan

moderat dengan kontribusi utama dari sektor jasa dan administrasi pemerintahan. Namun, secara keseluruhan, ketimpangan pertumbuhan di Sumatra menunjukkan adanya kebutuhan akan diversifikasi sektor ekonomi dan pemerataan infrastruktur antar provinsi (Bank Indonesia, 2024).

Kalimantan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, terutama Kalimantan Timur sebagai pusat Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan kontribusi besar dari sektor pertambangan dan konstruksi. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah juga mencatat pertumbuhan stabil dengan dorongan dari sektor perkebunan dan batu bara. Di sisi lain, Kalimantan Utara menunjukkan pertumbuhan yang belum optimal karena keterbatasan akses infrastruktur dan ketergantungan pada komoditas ekspor mentah. Meski demikian, perpindahan ibu kota negara diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi di wilayah ini dalam jangka panjang (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI, 2024).

Wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Papua menunjukkan dinamika pertumbuhan yang ekstrem. Di satu sisi, Maluku Utara mengalami lonjakan ekonomi akibat ekspansi industri pengolahan nikel. Namun di sisi lain, beberapa provinsi baru di Papua seperti Papua Pegunungan dan Papua Tengah mencatat pertumbuhan yang sangat rendah, bahkan mendekati stagnan, akibat tantangan geografis, infrastruktur terbatas, serta ketergantungan pada belanja pemerintah pusat. Disparitas yang tinggi di kawasan timur menjadi tantangan besar bagi pemerataan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kapasitas ekonomi lokal dan konektivitas antar wilayah (Tirto.id, 2024).

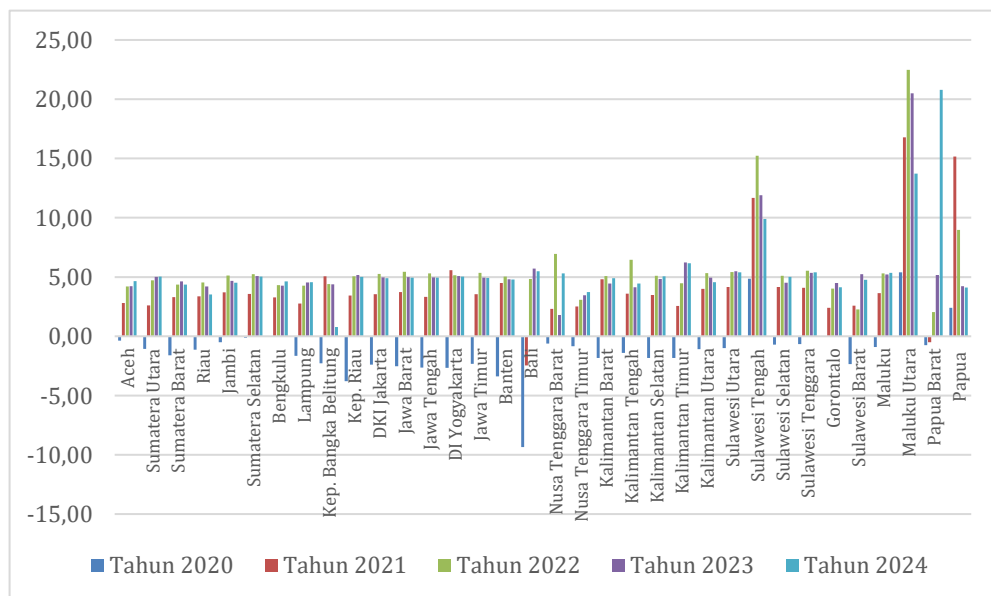
Permasalahan dalam menjaga stabilitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi domestik, tetapi juga dari faktor eksternal. Ketergantungan pada ekspor komoditas primer membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga internasional. Di sisi lain, produktivitas sektor industri dan pertanian masih rendah, dan pengeluaran pemerintah belum sepenuhnya diarahkan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. Selain itu, persoalan lingkungan seperti meningkatnya emisi karbon, polusi udara, serta penggunaan energi yang belum efisien turut menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan (World Bank, 2023).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (E. Dewi *et al.*, 2013). Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara, dapat dilihat dari tingkat produk domestik bruto (PDB) negara tersebut. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara sama halnya melihat bagaimana tingkat kesejahteraan yang terbangun dalam sebuah negara tersebut. Jika pemanfaatan sumber daya manusia digunakan dengan baik dan benar maka pertumbuhan ekonomi suatu negara tentunya akan mengarah pada titik

pertumbuhan ekonomi yang positif dengan begitu tingkat kesejahteraan dalam suatu negara akan tercipta.

Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi berdampak besar bagi pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai bagaimana masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi sehingga dapat terlihat adanya kenaikan atau penurunan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikut



nilai pertumbuhan ekonomi provinsi/kota di Indonesia tahun 2020 – 2024:

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Gambar 1.1 Nilai Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Kota di Indonesia Tahun 2020 – 2024 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat nilai pertumbuhan ekonomi diakhir tahun 2024 yang dimulai dari Pulau Sumatera, nilai tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara mencapai 5,03%, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga. Selain itu, sektor pertanian, perikanan, perdagangan besar, dan eceran juga mengalami peningkatan aktivitas yang memperkuat

perekonomian daerah. Dukungan belanja negara yang produktif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah turut mendorong pertumbuhan, termasuk melalui program-program pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan investasi di sektor strategis (Badan Pusat Statistik, 2025). Di sisi lain Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan nilai pertumbuhan ekonomi terendah di Pulau Sumatera sebesar 0,77 %, yang disebabkan oleh permasalahan tata kelola pertambangan dan penggalian. Permasalahan ini menyebabkan aktivitas ekspor timah terhambat bahkan mencapai nol pengiriman pada awal tahun 2024, padahal sektor pertambangan timah merupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat. Selain itu, lapangan usaha utama seperti jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, keuangan dan asuransi, serta perdagangan besar dan eceran yang bersama – sama memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Badan Pusat Statistik, 2025).

Pulau Jawa pertumbuhan ekonomi provinsi tertinggi adalah provinsi DI Yogyakarta sebesar 5,03%, yang di dorong permintaan domestik yang kuat mencakup kinerja investasi, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kenaikan Upah Minimum (UMP) tahun 2024 serta kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberikan dampak positif terhadap belanja pemerintah dan mendorong aktivitas ekonomi. Selain itu, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masih berlanjut, seperti proyek jalan tol Jogja-Solo, Jalur Jalan Lintas Selatan, dan jalan alternatif Sleman – Gunung Kidul, juga memberikan kontribusi

terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor konstruksi. Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, terkait erat dengan sektor pariwisata hal ini didorong oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan terutama pada hari libur nasional. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DI Yogyakarta juga didukung oleh kesinambungan pembangunan infrastruktur yang terus mendorong pertumbuhan ekonomi di masa mendatang (Badan Pusat Statistik, 2025). Di sisi lain Provinsi Banten menjadi provinsi dengan nilai pertumbuhan ekonomi terendah di Pulau Jawa sebesar 4,79 %, tumbuh melambat dibandingkan tahun 2023 disebabkan oleh sektor industri pengolahan yang tidak beroperasi penuh sepanjang tahun, terutama pada triwulan awal. Hal ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan di enam lapangan sektor industri dan konstruksi yang pertumbuhannya hampir stagnan dibandingkan tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2025).

Pulau Kalimantan, pertumbuhan ekonomi provinsi tertinggi adalah provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,17 %, yang didorong oleh kinerja positif di seluruh lapangan usaha. Sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian provinsi Kalimantan Timur adalah pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan (Badan Pusat Statistik, 2025). Di sisi lain provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan nilai pertumbuhan ekonomi terendah di Pulau Kalimantan sebesar 4,46 % yang disebabkan terjadinya kontraksi pada sektor industri pengolahan dan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang kurang dominan di bandingkan provinsi Kalimantan Timur (Badan Pusat Statistik, 2025).

Pulau Sulawesi, pertumbuhan ekonomi provinsi tertinggi adalah provinsi Sulawesi Tengah sebesar 9,89 %, didorong oleh pertumbuhan yang terjadi diseluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah indutsri pengolahan sebesar 19,12%. Diikuti jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,48% dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,58%. Sementara itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dan pertambangan dan penggalian yang juga memiliki peran dominan masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 1,93% dan 6,19% (Badan Pusat Statistik, 2025). Di sisi lain provinsi Gorontalo menjadi provinsi dengan nilai pertumbuhan ekonomi terendah di Pulau Sulawesi sebesar 4,13% lebih rendah dibandingkan tahun 2023, yang disebabkan oleh struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (37,29%), serta perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (14,22%), serta konstruksi (11,34%). Meskipun sektor perdagangan dan konstruksi tumbuh positif dengan peningkatan masing – masing sekitar 7,48% dan 6,41%, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 6,42%, dominasi sektor pertumbuhan moderat dan kurangnya diversifikasi industri menjadi pembatas utama laju pertumbuhan ekonomi provinsi Gorontalo (Badan Pusat Statistik, 2025).

Pulau Papua, pertumbuhan ekonomi provinsi tertinggi adalah provinsi Papua Barat sebesar 20,80% didorong pertumbuhan positif yang dimulai dari komponen pembentukan modal tetap bruto yang mengalami kontraksi sebesar 2,56%. Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 16,10%, komponen

pengeluaran konsumsi LNPRT (PK – LNPRT) yang tumbuh sebesar 9,84% dan pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK – RT) yang tumbuh sebesar 3,91% (Badan Pusat Statistik, 2025). Di sisi lain provinsi Papua menjadi provinsi dengan nilai pertumbuhan ekonomi terendah di Pulau Papua sebesar 4,11%, disebabkan oleh beberapa faktor. Meskipun terjadi pertumbuhan di semua lapangan usaha, tingkat pertumbuhan sektor – sektor utama masih moderat, seperti pengadaan listrik dan gas yang tumbuh 8,74%, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 7,20%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 6,73%. Namun, laju pertumbuhan ini melambat di bandingkan tahun 2023 yang tumbuh 4,22%. Struktur ekonomi Papua masih dalam tahap berkembang dengan kebutuhan diversifikasi yang belum optimal, termasuk pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selain itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap juga relatif rendah, menahan percepatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Badan Pusat Statistik, 2025).

Pertumbuhan ekonomi merupakan ranah strategis yang harus senantiasa dibangun dan dikembangkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kendatipun demikian, perlu disadari bahwa dengan maraknya pembangunan perekonomian dewasa ini sebagai tuntutan kebutuhan, justru memunculkan masalah yang cukup dilematis, yaitu menyangkut ketidakseimbangan antara pembangunan perekonomian pada satu sisi dan pelestarian alam dan lingkungan di sisi lain. Fenomena menurunnya kualitas sumber daya alam, terjadinya kerusakan lingkungan secara masif, polusi, banjir, dan semakin luasnya lahan kritis

merupakan bukti dari dampak pembangunan ekonomi yang tidak sejalan dengan pelestarian alam dan lingkungan (Suhada & Setyawan, 2016).

Di Papua Barat, dampak degradasi lingkungan yang ditandai oleh deforestasi dan pencemaran air tidak hanya mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati, tetapi juga mengganggu produktivitas sektor agribisnis dan perikanan sehingga menurunkan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) provinsi. Penurunan produktivitas tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan dan lapangan kerja di sektor terkait, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat adat yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Bila dibandingkan dengan kondisi nasional, di mana provinsi lain yang memiliki pengelolaan lingkungan yang lebih baik menunjukkan stabilitas di sektor ekonomi tersebut, situasi di Papua Barat menuntut adanya kebijakan terpadu antara pengelolaan lingkungan dan pembangunan ekonomi guna mengatasi kerusakan ekosistem sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat, juga mengakibatkan gangguan pada daerah aliran sungai (DAS).

Sekitar 61.195 hektare dari daerah aliran sungai tersebut berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. DAS ini merupakan salah satu tempat tinggal tertua yang masih dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat adat Papua. Sementara itu, masyarakat adat yang bergantung pada air di bagian hilir untuk kebutuhan sehari-hari, penurunan kualitas air yang mencolok berpotensi memperburuk masalah kesehatan masyarakat di komunitas-komunitas adat (Asmara & Randhir, 2024).

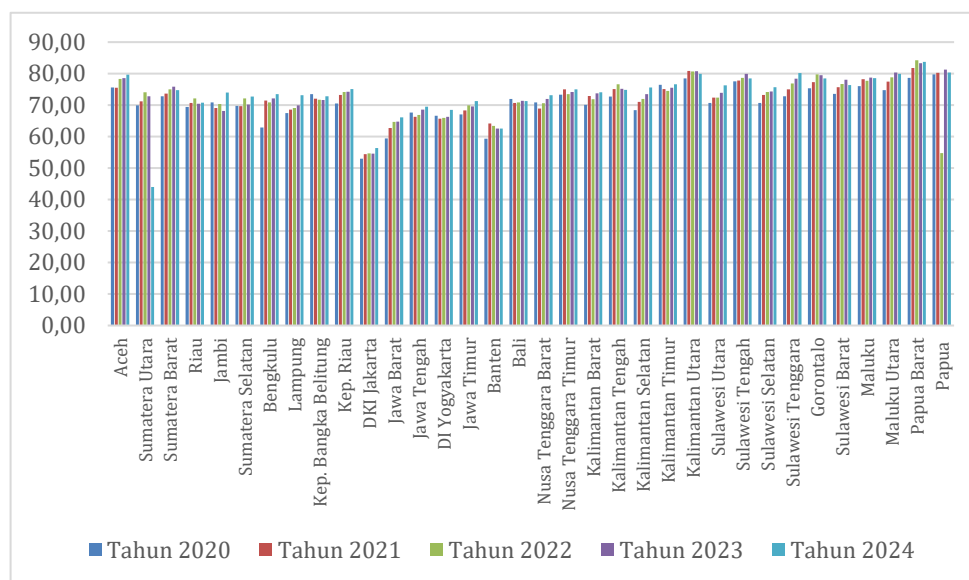
Upaya adaptasi lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mitigasi risiko bencana sangat potensial memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan adaptasi lingkungan saling berkaitan dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup memiliki hubungan yang saling memengaruhi dan seringkali bersifat dilematis. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan pendapatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat; namun di sisi lain, ekspansi ekonomi yang tidak terkelola dengan baik dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, dan penurunan kualitas ekosistem. Hal ini tampak dalam berbagai studi, seperti yang dikemukakan oleh Panayotou (2003) dalam *Environmental Kuznets Curve hypothesis*, yang menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, degradasi lingkungan cenderung meningkat, namun setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu, masyarakat mulai menuntut lingkungan yang bersih sehingga kualitas lingkungan kembali membaik. Temuan serupa dikemukakan oleh Tadesse dan Zeleke (2021) dalam *jurnal Environmental Systems Research*, yang menunjukkan bahwa korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hanya dapat tercapai apabila pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan disertai kebijakan lingkungan yang efektif. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang tidak hanya meningkatkan angka PDB, tetapi juga menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup sebagai basis keberlanjutan jangka panjang.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komprehensif yang mencerminkan kondisi lingkungan suatu wilayah, yang dinilai dari tiga komponen utama yaitu kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. Kualitas udara diukur berdasarkan konsentrasi polutan seperti partikulat (PM10), karbon monoksida, dan ozon. Sementara itu, kualitas air ditentukan oleh parameter seperti *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) yang mengukur tingkat pencemaran air. Tutupan lahan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama melalui keberadaan hutan dan lahan hijau yang menyerap karbon dan menjaga siklus air. Oleh karena itu, IKLH tidak hanya menjadi cerminan kesehatan lingkungan, tetapi juga menjadi penanda penting dalam pembangunan berkelanjutan. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2024).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencerminkan kondisi lingkungan yang meliputi kualitas udara, air dan tutupan lahan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IKLH menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan melalui peningkatan kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai program-program lingkungan, seperti pengelolaan limbah, konservasi hutan, dan pengendalian pencemaran. Namun, di sisi lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pendekatan berkelanjutan justru berpotensi menurunkan kualitas lingkungan akibat peningkatan emisi, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali.

(Handayani & Maulidah, 2021; Nugroho *et al.*, 2020). Berikut nilai indeks kualitas lingkungan hidup provinsi/kota di Indonesia tahun 2020 – 2024:



Sumber Data: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025

Gambar 1 2 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi di Indonesia Tahun 2020 - 2024 (Poin)

Gambar 1.2 dapat dilihat nilai indeks kualitas lingkungan hidup pada akhir tahun 2024 yang dimulai dari Pulau Sumatera, nilai tertinggi adalah Provinsi Aceh sebesar 79,66 didorong oleh berbagai faktor utama, seperti pengelolaan lingkungan yang baik, tingginya nilai indeks kualitas lahan di beberapa kabupaten, serta upaya perlindungan kawasan hutan dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Selain itu kontribusi dari kualitas udara dan air yang terjaga, kebijakan pemerintahan dan peran aktif masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan (KLHK, 2024). Di sisi lain provinsi dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terendah adalah provinsi Riau sebesar 70,77 yang disebabkan oleh masalah pencemaran yang cukup tinggi terutama dari aktivitas industri, rumah tangga, serta usaha skala kecil. Kualitas air dan udara di Provinsi Riau relatif rendah dibandingkan provinsi lain, akibat limpasan limbah domestik dan

industri yang belum tertangani secara optimal. Selain itu, deforestasi, pembukaan lahan, kebakaran hutan, dan keterbatasan kapasitas pengelolaan lingkungan turut menurunkan indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Riau (DLHK Riau, 2025).

Pulau Jawa, indeks kualitas lingkungan hidup tertinggi adalah provinsi Jawa Timur yang didukung adanya perbaikan dalam pengelolaan kualitas air, kualitas udara, dan lahan yang berkelanjutan. Faktor pendorong utamanya adalah implementasi program lingkungan oleh pemerintah daerah secara berkelanjutan, penggunaan teknologi hijau, serta adanya kolaborasi aktif lintas sektor dalam pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan (DLHK Jawa Timur, 2024). Di sisi lain provinsi dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup terendah di Pulau Jawa adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 56,38 yang disebabkan oleh tingginya tingkat pencemaran udara, terutama dari konsentrasi partikel halus PM2.5 yang meningkat, terutama pada musim kemarau yang dipengaruhi oleh El Nino. Selain itu, kualitas air yang masih menghadapi tantangan pencemaran dari limbah domestik dan industri juga berkontribusi menurunkan nilai indeks kualitas lingkungan hidup (DLHK DKI Jakarta, 2025).

Pulau Kalimantan, indeks kualitas lingkungan hidup tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 79,95 didorong oleh luasnya kawasan hutan yang masih terlindungi yang menjadi penopang utama kualitas lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional perusahaan agar sesuai dengan standar lingkungan yang ketat. Upaya ini didukung dengan target nol emisi karbon pada 2045 yang telah mulai

dijalankan secara struktural dan sistematis, sehingga memberikan kontribusi besar pada peningkatan kualitas udara, air, dan lahan (DLHK Kalimantan Utara, 2025).

Di sisi lain provinsi dengan indeks kualitas lingkungan hidup terendah di Pulau Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 74,05 disebabkan oleh tekanan terhadap kualitas air dan lahan akibat aktivitas ekonomi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Barat masih terbilang rendah, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik (DLHK Kalimantan Barat, 2025).

Pulau Sulawesi, indeks kualitas lingkungan hidup tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 80,14 didorong oleh kebijakan pemerintah provinsi yang proaktif dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta kegiatan bersih – bersih kawasan publik seperti Tugu Persatuan. Selain itu, penerapan ekonomi sirkular seperti pembentukan budidaya maggot untuk mengelola sampah organik (DLHK Sulawesi Tenggara, 2024). Di sisi lain provinsi dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup terendah di Pulau Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 75,70 disebabkan oleh tantangan dalam pengelolaan lingkungan yang masih harus diatasi, seperti tekanan dari emisi kendaraan bermotor yang tinggi di Kota Makassar, permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan wisata, serta kebutuhan rehabilitasi hutan dan lahan yang masih berproses (DLHK Sulawesi Selatan, 2024).

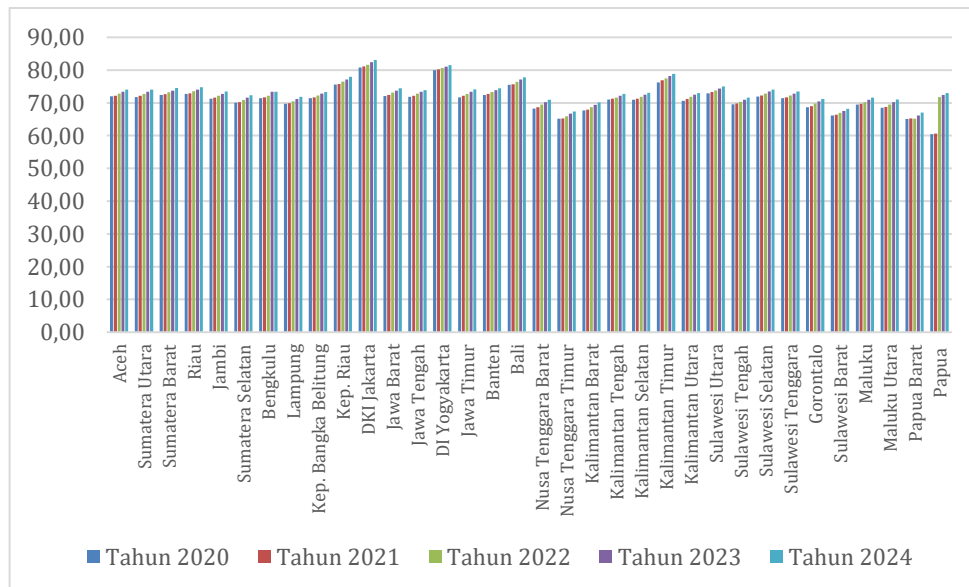
Pulau Papua, nilai indeks kualitas lingkungan hidup tertinggi adalah Provinsi Papua Barat sebesar 83,75 didorong oleh pengelolaan lingkungan yang

baik terutama dalam aspek kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Provinsi Papua Barat memiliki kualitas udara yang baik di Indonesia dan indikator kualitas air serta lahan laut yang terus mengalami perbaikan (KLHK, 2024). Di sisi lain, provinsi dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup terendah di Pulau Papua adalah provinsi Maluku sebesar 78,59 yang disebabkan oleh keterbatasan pemantuan dan pengelolaan lingkungan, seperti kurangnya titik pantau dan anggaran yang memadai, serta adanya aktivitas masyarakat yang berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan (DLHK Maluku, 2024).

Sementara itu, kualitas dari sumber daya manusia menjadi sebuah indikator pada pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Modal yang berdasarkan pada manusia apabila memiliki kualitas yang tinggi, maka akan berdampak pada meningkatnya produktivitas suatu negara. Bentuk modal manusia dikatakan berkualitas baik salah satunya dengan melihat dari tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dijadikan suatu parameter sebagai taraf kualitas modal manusia terhadap pembangunan perekonomian suatu negara dengan diindikasikan beberapa faktor pengukurannya yaitu pendidikan, kesehatan, serta indikator ekonomi (Nainggolan-dkk, n.d.).

Adanya keterkaitan yang tinggi mengenai keterlibatan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan sumber daya manusia. Tingginya tingkat pembangunan manusia merupakan tolak ukur dari sumber daya manusia dalam penyerapan serta pengendalian pertumbuhan ekonomi secara teknologi maupun sarana kelembagaan yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik (Mukaromah *et al.*, 2023)

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Penelitian di Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Suryani (2022) membuktikan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian pula, penelitian oleh Nurhayati dan Widyasari (2023) di Kalimantan Barat menyimpulkan bahwa dimensi pendidikan dan kesehatan dalam IPM berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun standar hidup menunjukkan pengaruh negatif. Namun, tidak semua wilayah menunjukkan hasil yang sama penelitian di Provinsi Papua oleh Salampessy (2023) menunjukkan bahwa IPM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan adanya faktor lain yang lebih dominan dalam mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal atau terisolasi. Oleh karena itu, memahami hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan angka semata, melainkan juga pada pemerataan kualitas hidup masyarakat. Berikut nilai indeks pembangunan manusia provinsi/kota di Indonesia tahun 2020 – 2024:



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Gambar 1.3 Nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2020 - 2024 (Poin)

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat nilai indeks pembangunan manusia pada akhir tahun 2024 yang dimulai dari Pulau Sumatera, nilai tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 77,97 didorong oleh kemajuan tiga dimensi utama IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat sekitar 75,12 tahun, angka lama sekolah 13,27 tahun, dan pengeluaran riil perkapita mencapai Rp 15,573 juta pertahun. Selain itu, Kepulauan Riau juga berhasil mengembangkan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah, seperti teknik pengelasan bawah air (BPS Kep. Riau, 2025). Di sisi lain provinsi dengan nilai indeks pembangunan manusia terendah di Pulau Sumatera adalah Provinsi Lampung sebesar 71,81 disebabkan oleh terbatasnya akses kualitas pendidikan, kesehatan, serta pendapatan masyarakat yang relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera. Hal ini mencerminkan tantangan dalam peningkatan harapan lama sekolah, umur harapan hidup, serta standar hidup layak masyarakat Provinsi

Lampung. Meskipun ada peningkatan nilai selama beberapa tahun terakhir, kemajuan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih belum seoptimal daerah lain di Pulau Sumatera (BPS Lampung, 2024).

Pulau Jawa, nilai indeks pembangunan manusia tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 83,08 didorong oleh kemajuan signifikan pada tiga dimensi utama IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Usia harapan hidup DKI Jakarta sekitar 75,99 tahun, menunjukkan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Rata – rata lama sekolah penduduk mencapai 11,49 tahun dengan harapan lama sekolah hingga 13,51 tahun, mencerminkan akses pendidikan yang lebih baik hingga tingkat diploma. Selain itu, pengeluaran riil per kapita juga cukup tinggi sekitar Rp 19,95 juta (BPS DKI Jakarta, 2024). Di sisi lain nilai indeks pembangunan manusia terendah adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 73,43 disebabkan oleh tantangan dalam memperpanjang harapan lama sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan dan menambah umur harapan hidup yang belum optimal. Selain itu, tingkat pengeluaran per kapita masyarakat juga relatif rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa (BPS Jawa Barat, 2024).

Pulau Kalimantan, nilai indeks pembangunan manusia tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 78,83 didorong oleh peningkatan dimensi utama IPM yakni, umur panjang dan sehat, pendidikan, dan standar hidup layak. Harapan hidup bayi yang lahir meningkat sekitar 74,94 tahun, harapan lama sekolah meningkat 14,03 tahun menandakan akses pendidikan yang cukup baik. Selain itu, pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan naik menjadi Rp 13,79 juta per tahun, mencerminkan peningkatan standar hidup masyarakat (BPS

Kalimantan Timur, 2024). Di sisi lain nilai indeks pembangunan manusia terendah di Pulau Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 70,13 disebabkan oleh peningkatan dimensi utama IPM masih relatif rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Umur harapan hidup hanya sebesar 73,94 tahun, harapan lama sekolah 12,68 tahun, rata rata lama kolah 7,78 tahun, dan pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan hanya Rp 10,321 juta pertahun (BPS Kalimantan Barat, 2024).

Pulau Sulawesi, nilai indeks pembangunan manusia tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 75,03 didorong oleh kemajuan dimensi utama IPM yaitu, umur harapan hidup mencapai 74,08 tahun, harapan lama sekolah sebesar 12,97 tahun, dan rata – rata lama sekolah sebesar 9,84 tahun yang mencerminkan kualitas pendidikan yang semakin baik. Selain itu, pengeluaran riil perkapita sebesar Rp 12 juta per tahun juga menunjukkan peningkatan standar hidup masyarakat (BPS Sulawesi Utara, 2024). Di sisi lain, provinsi dengan nilai indeks pembangunan manusia terendah di Pulau Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 68,20 disebabkan oleh tantangan tiga dimensi indeks pembangunan manusia masih relatif rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Sulawesi. Meskipun terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya , harapan lama sekolah sekitar 12,89 tahun dan rata – rata lama sekolah 8,15 tahun. Umur harapan hidup tercatat 71,03 tahun dan pengeluaran per kapita terbatas diangka Rp 10,21 juta per tahun yang masih dibawah provinsi lain (BPS Sulawesi Barat, 2024).

Pulau Papua, nilai indeks pembangunan manusia tertinggi adalah Provinsi Papua sebesar 73,00 didorong oleh peningkatan tiga dimensi indeks pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Umur harapan hidup penduduk Papua meningkat 70,47 tahun, harapan lama sekolah sedikit meningkat 13,72 tahun. Selain itu, pengeluaran riil perkapita masyarakat juga meningkat sebesar Rp 11 juta per tahun. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua (BPS Papua, 2024). Di sisi lain, provinsi dengan nilai indeks pembangunan manusia terendah di Pulau Papua adalah Provinsi Papua Barat sebesar 67,02 disebabkan oleh tantangan tiga dimensi yang masih relatif rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Papua, dengan rata – rata lama sekolah yang masih terbatas sebesar 7,86 tahun dan harapan lama sekolah sebesar 13,17 tahun. Umur harapan hidup juga relatif rendah sebesar 68,47 tahun dan pengeluaran riil per kapita hanya sebesar Rp 8, 80 juta per tahun masih relatif rendah dibawah provinsi lain (BPS Papua Barat, 2024).

Kenaikan IPM secara umum di seluruh provinsi dipengaruhi beberapa faktor. Pertama peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang tercermin dari bertambahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di berbagai daerah. Program pemerintah wajib belajar, peningkatan kualitas guru, serta pembangunan sekolah baru turut mendorong perbaikan ini. Kedua, perbaikan pada sektor kesehatan, meningkatnya cakupan imunisasi dan peningkatan fasilitas layanan kesehatan berkontribusi pada meningkatnya harapan hidup masyarakat. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang stabil, pembangunan infrastruktur dan

bantuan sosial telah meningkatkan daya beli dan standar hidup masyarakat di daerah.

Namun disparitas antarprovinsi masih terasa nyata. Provinsi dengan nilai IPM terendah umumnya menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, distribusi tenaga didik dan medis yang belum merata, hingga faktor geografis yang menyulitkan pemerataan pembangunan. Wilayah timur seperti Papua dan Papua Barat memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas yang cukup tinggi sehingga memperlambat laju peningkatan IPM.

Secara umum, tren peningkatan IPM provinsi di Indonesia ini menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan pembangunan daerah, dukungan fiskal, dan kualitas pelaksanaan program sangat berpengaruh terhadap hasil pembangunan manusia. Namun, keberlanjutan peningkatan IPM juga sangat rentan terhadap faktor-faktor seperti ketimpangan antarwilayah, ketergantungan terhadap sektor tertentu, dan lemahnya tata kelola anggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga berorientasi pada pemerataan, keberlanjutan, dan inklusivitas demi mengurangi kesenjangan antar provinsi dalam capaian pembangunan manusia.

Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM sangat bergantung pada sinergi kebijakan pembangunan daerah, dukungan fiskal yang kuat, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan dalam pencapaian pembangunan manusia.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi maka meningkatnya indeks pembangunan manusia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, (Muh Suriadi, 2019) (Wahyuni, 2022) (Novia Hera Pratami, 2020) (Tanjung, 2019) (Rindiyan & Abd. Mubaraq, 2023) (N. L. S. Dewi & Sutrisna, 2014) (Susanto & Rachmawati, 2013)

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan dalam mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan suatu fenomena moneter dalam suatu negara yang dimana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Apabila dalam suatu wilayah atau negara tersebut stabil, dapat dikatakan negara tersebut merupakan negara maju, begitu juga dengan sebaliknya apabila keadaan ekonomi daerah atau negara itu tidak stabil, dapat dikatakan negara tersebut belum bisa dikategorikan sebagai negara maju. (Lia Purnama Sari, 2021)

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian yang mencerminkan laju kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Stabilitas inflasi menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Simanungkalit (2020)

menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 1983–2014, dengan koefisien determinasi sebesar 74,76%, yang berarti inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Demikian pula, studi oleh Siti Nuriyah (2024) menemukan bahwa inflasi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2016–2020, dengan tingkat inflasi yang tinggi cenderung menurunkan pertumbuhan ekonomi.

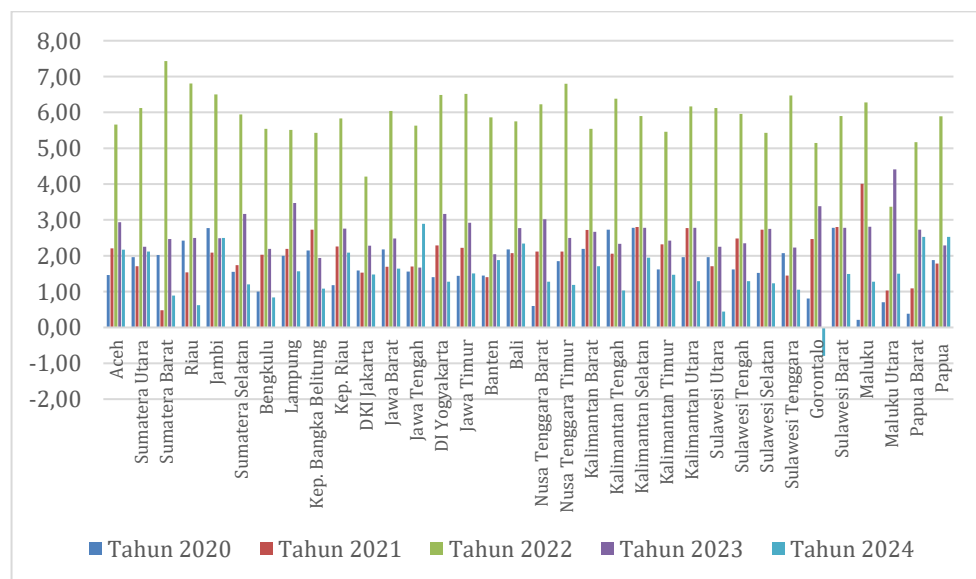
Namun, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa inflasi yang moderat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan insentif bagi produsen untuk meningkatkan output. Oleh karena itu, memahami hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan dua indikator makroekonomi yang saling berkaitan dan menjadi fokus utama dalam kebijakan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi, yang diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mencerminkan peningkatan output barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sementara itu, inflasi menggambarkan tingkat kenaikan harga umum barang dan jasa secara terus-menerus dalam suatu periode.

Hubungan antara keduanya bersifat dinamis dan sering kali tidak linear. Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memicu tekanan inflasi akibat meningkatnya permintaan agregat yang tidak diimbangi oleh

peningkatan penawaran. Sebaliknya, inflasi yang moderat dapat menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi karena mendorong pelaku ekonomi untuk meningkatkan investasi dan konsumsi.

Inflasi yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan daya beli masyarakat, menurunkan tabungan riil, serta menciptakan ketidakpastian yang berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi. Beberapa penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi dalam batas yang wajar menjadi salah satu prasyarat penting untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2020). Berikut nilai inflasi provinsi/kota di Indonesia tahun 2020 – 2024:



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Gambar 1 4 Nilai Inflasi 5 Provinsi di Indonesia Tahun 2020 – 2024 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat nilai inflasi pada akhir tahun 2024

yang dimulai dari Pulau Sumatera, nilai tertinggi adalah Provinsi Jambi sebesar 2,50% yang didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman

dan tembakau sebesar 8,53%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,21%, dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01% (BPS Jambi, 2024). Di sisi lain provinsi dengan nilai inflasi terendah di Pulau Sumatera adalah Provinsi Bengkulu sebesar 0,84% disebabkan oleh penurunan indeks kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,42%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,71% (BPS Bengkulu, 2024).

Pulau Jawa, nilai inflasi tertinggi adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,89% didorong oleh kenaikan kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,63%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,71%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,25%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,94%, kelompok kesehatan sebesar 1,36%, kelompok transportasi sebesar 1,41%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,97%, kelompok pendidikan sebesar 1,88%, kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 1,59% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 2,90% (BPS Jawa Barat, 2024). Di sisi lain, provinsi dengan nilai inflasi terendah di Pulau Jawa adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,48% disebabkan oleh kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu, kelompok transportasi sebesar 1,15% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04% (BPS DKI Jakarta, 2024).

Pulau Kalimantan, nilai inflasi tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 1,95% didorong oleh naiknya sepuluh indeks pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,46%. Kelompok pakaian

dan alas kaki sebesar 1,15%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,43%. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,63%. Kelompok kesehatan sebesar 3,91%. Kelompok transportasi sebesar 1,83%. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,28%. Kelompok pendidikan sebesar 1,62%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman 1,73% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 10,48% (BPS Kalimantan Selatan, 2024). Di sisi lain, provinsi dengan nilai inflasi terendah di Pulau Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1,03% disebabkan oleh kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03% (BPS Kalimantan Tengah, 2024).

Pulau Sulawesi, nilai inflasi tertinggi adalah Provinsi Gorontalo sebesar 2,78% yang didorong oleh naiknya indeks sembilan kelompok pengeluaran yaitu, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,10%. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,28%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03%. Kelompok kesehatan sebesar 1,97%. Kelompok transportasi sebesar 0,02%. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,40%. Kelompok pendidikan sebesar 2,72% (BPS Gorontalo, 2024). Di sisi lain, provinsi dengan nilai inflasi terendah di Pulau Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,44% disebabkan oleh kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 32,36%. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,99%.

Kelompok transportasi sebesar 0,19%. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,25 dan kelompok pendidikan sebesar 1,20% (BPS Sulawesi Utara, 2024).

Pulau Papua, nilai inflasi tertinggi adalah Provinsi Papua Barat sebesar 2,53% didorong oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran yaitu, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,33%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,53%. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,20%. Kelompok pendidikan sebesar 4,54%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 0,85% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,24% (BPS Papua Barat, 2024). Di sisi lain, provinsi dengan nilai inflasi terendah di Pulau Papua adalah Provinsi Maluku sebesar 1,28% disebabkan oleh kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,62%. Kelompok transportasi sebesar 1,61%. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,38% (BPS Maluku, 2024).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh, (Simanungkalit, 2020) (Nuriyah *et al.*, 2024) (Kartika & Pasaribu, 2013) (Ramadhaniyati *et al.*, 2023) (Astuti, 2023).

Sedangkan ada beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi seperti penelitian yang dilakukan oleh, (R., 2017) (Nuriyah *et al.*, 2024) (Agus & Herawati, 2023) (Lamatenggo *et al.*, 2019)

Inflasi yang dianggap berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi adalah inflasi yang tinggi dan tidak stabil, yang dapat mengakibatkan penurunan konsumsi domestik serta daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, inflasi yang tinggi juga berisiko menurunkan efisiensi produksi, karena kenaikan harga barang dan jasa membuat masyarakat cenderung mengurangi konsumsi, sehingga keuntungan perusahaan yang diharapkan menjadi lebih kecil.

Inflasi dapat memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi jika tetap stabil dan terkendali, karena hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi, yang merupakan salah satu komponen utama dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, hal ini akan mendorong investasi, karena perusahaan mungkin akan terdorong untuk berinvestasi dalam ekspansi atau meningkatkan produktivitas produksi seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji pengaruh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan inflasi secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024.

Studi sebelumnya umumnya menganalisis IPM atau inflasi secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, tanpa memasukkan indikator lingkungan sebagai variabel independen. Dengan melibatkan IKLH sebagai proksi adaptasi lingkungan, penelitian ini memperkenalkan perspektif ekologis dalam analisis pembangunan ekonomi daerah, sesuatu yang masih langka dalam literatur

ekonomi regional di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hubungan antar variabel, tetapi juga menghadirkan basis empiris baru bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berbasis lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut sehingga penulis memberi judul proposal skripsi ini **“Pengaruh Adaptasi Lingkungan, Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Kota di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari hasil penjabaran yang telah tersampaikan pada muatan latar belakang, maka penulis mencoba merumuskan masalah pada penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Apakah adaptasi lingkungan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi/Kota di Indonesia ?
2. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi/Kota di Indonesia ?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi/Kota di Indonesia ?
4. Apakah adaptasi lingkungan, indeks pembangunan manusia dan inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi/Kota di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari apa yang terumuskan pada perumusan masalah di atas, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan daripada tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah adaptasi lingkungan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi/Kota di Indonesia.
2. Mengetahui apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi/Kota di Indonesia.
3. Mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi/Kota di Indonesia.
4. Mengetahui apakah adaptasi lingkungan, indeks pembangunan manusia dan inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi/Kota di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian penulis ini diharapkan dapat menjadi kontribusi untuk ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang ekonomi pembangunan dapat tersebar untuk seluruh pembelajar, serta dapat menjadi acuan penelitian berikutnya yang menganalisis tentang adaptasi lingkungan, indeks pembangunan manusia, inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia maupun provinsi yang ada di Indonesia.